

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hakikat pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Bentuk nyata peran pemerintah dalam mendorong kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adalah pemerintah mempunyai kewenangan besar dalam hal pengelolaan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Sementara kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dalam hal ini diarahkan pada parameter yang sudah menjadi parameter internasional dalam hal kesejahteraan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan sektor Pendidikan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, indikator kesehatan dan pendidikan adalah salah satu komponen utama selain pendapatan, karena kesehatan serta pendidikan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan sumber daya manusia yang baik dan memadai maka pelaksanaan pembangunan akan semakin lancar. Pemerintah hendaknya memperhatikan hal tersebut terlebih jika memandang manusia merupakan subjek dan objek pembangunan, sehingga pembangunan manusia yang kemudian menunjang pembangunan di berbagai sektor akan mewujudkan kesejahteraan bagi manusia yang berada dalam

wilayah pemerintahan tersebut (Baiq, 2017). Pendidikan dan Kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Menurut Meier dan Rauch (dalam Brata, 2004) pendidikan atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. (Septiana, Dkk. 2015) Pengeluaran pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan sangat erat kaitannya dengan indeks pembangunan manusia, semakin tinggi angka murid yang melanjutkan ke perguruan tinggi semakin besar peluang untuk memperoleh lapangan pekerjaan dan mempunyai keahlian sehingga berkurangnya angka pengangguran dan meningkatkan produktifitas serta mensejahterakan masyarakat. Secara umum, kualitas manusia di Kota Kupang yang diukur melalui IPM terlihat meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1
Indeks Pembangunan Manusia di Kota Kupang
Tahun 2012-2021

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
76.38	77.24	77.58	77.95	78.14	78.25	78.84	79.55	79.71	79.74

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kupang, 2022

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Kupang mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2021 IPM Kota Kupang berjumlah 79.74%. Angka tersebut naik dari jumlah yang sebelumnya 79.71%. Di Kota

Kupang yang merupakan Ibukota Nusa Tenggara Timur yang memiliki angka indeks pembangunan menengah.

IPM digunakan untuk melakukan pemeringkatan terhadap kinerja pembangunan suatu wilayah didunia. Menurut BPS (2017) UNDP membedakan tingkat IPM berdasarkan 3 klasifikasi :

- a. Kelompok wilayah dengan tingkat pembangunan manusia terendah (*low human development*) bisa memiliki nilai IPM kurang dari 50%.
- b. Kelompok wilayah dengan tingkat pembangunan manusia menengah (*medium human development*), bila memiliki nilai IPM 50% sampai 79,99%.
- c. Kelompok wilayah dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi (*high human development*), bila memiliki nilai IPM 80% ke atas.

Maka dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia di Kota Kupang tergolong dalam tingkat *medium human development* atau pembangunan manusia yang tergolong sedang yakni kisaran antara 50% sampai 79%.

Pembangunan manusia tidak terlepas dari peran pemerintah dalam pembangunan, karena manusia merupakan modal utama dalam suatu daerah. Kebijakan alokasi APBD sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berlakunya desentralisasi fiskal, hal ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat membangun daerahnya masing-masing secara optimal.

Pemerintah melakukan pengeluaran atau investasi yang ditujukan pada pembangunan manusia yakni sektor pendidikan dan kesehatan yang merupakan sektor yang sangat vital dalam pembentukan modal manusia yang akan berdampak pada pembangunan suatu daerah. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang produktif. Dalam hal ini modal manusia dapat mengacu pada pendidikan dan juga kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah.

Pendidikan adalah modal manusia untuk dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan yang menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah Negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar terciptanya pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan yang diberikan kepada para pelajar tidak hanya pendidikan yang sebatas teori saja namun harus berdasarkan prakteknya juga, serta menanamkan pendidikan yang berdasarkan agama agar dapat mewujudkan anak bangsa yang cerdas serta berakhlak baik.

Kesehatan merupakan salah satu bagian penting dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia. Pemenuhan kebutuhan kesehatan oleh pemerintah merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar produknya. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, sudah seharusnya pemerintah menyediakan sarana public seperti kesehatan untuk meningkatkan produktivitas pembangunan manusia. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah.

Pengeluaran pemerintah dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan yaitu :*Pengeluaran Rutin* : pengeluaran rutin adalah pengeluaran secara rutin setiap tahunnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan roda pemerintah, yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan. *Pengeluaran Pembangunan*: pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk baik prasarana fisik maupun non fisik, yang tujuannya untuk membiayai program-program pembangunan pemerintah daerah.

Tujuan dari pengeluaran pemerintah rutin dan pengeluaran pembangunan adalah salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan berbagai pemenuhan kebutuhan, seperti pendidikan dan kesehatan.

Pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan akan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Pemerintah berusaha meningkatkan investasi sumber daya manusia yang dimiliki dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi memungkinkan dapat meningkatkan output dan pendapatan dimasa yang akan datang sehingga dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia. Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM ditandai dengan adanya perkembangan pengeluaran pemerintah disektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi setiap tahunnya meskipun mengalami keadaan yang fluktuatif. Hal ini selaras dengan peningkatan pengeluaran pemerintah total dari tahun ke tahun. Pengeluaran pemerintah di Indonesia dapat dilihat dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) pada sisi belanja Negara atau pengeluaran. Sebenarnya ada perubahan unsure pengeluaran dengan adanya desentralisasi. Sebelum desentralisasi, pengeluaran pemerintah terdiri dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Sedangkan setelah desentralisasi, pengeluaran pemerintah terdiri dari anggaran pemerintah pusat dan anggaran daerah yaitu APBD. Namun, besarnya pengeluaran pemerintah baik sebelum maupun setelah desentralisasi masih sama tergantung proyeksi pendapatan Negara.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu Negara dalam suatu periode tertentu adalah produk domestik broyu. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu Negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang atau jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Pengeluaran pemerintah merupakan suatu jenis kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah mensejahterakan masyarakat dan menuju pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah terhadap sektor pendidikan merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah yang memacu kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah tidak hanya bentuk beasiswa ataupun bantuan pendidikan, bantuan bagi orang yang kurang mampu, namun pengeluaran di sektor pendidikan juga termasuk fisik dan non fisik. Untuk mengetahui perkembangan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2
Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Kota
Kupang (dalam rupiah)
Tahun 2012-2021

Tahun	Sektor Pendidikan	Sektor Kesehatan
2012	313.636.641.100	48.429.988.925
2013	373.975.416.090	53.444.534.555
2014	430.722.214.725	67.660.385.874
2015	468.494.410.172	70.783.591.228
2016	486.275.626.081	91.228.909.472
2017	337.409.506.177	101.289.039.105
2018	333.564.986.348	112.415.198.282
2019	359.271.449.369	127.490.066.308
2020	337.928.390.358	130.555.113.996
2021	329.908.620.526	132.272.995.002

Sumber : Bappeda Kota 2022

Berdasarkan tabel 1.2 diatas jumlah totas pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan mengalami ketidakstabilan dari tahun 2012-2021 terus mengalami peningkatan pengeluaran yaitu sebesar Rp 313.636.641.100 ditahun 2012 sedangkan Rp 337.409.506.177 ditahun 2017 dan ditahun 2021 pengeluaran pemerintah sektor pendidikan mengalami penurunan drastis yaitu sebesar Rp 329.908.620.526. selanjutnya dalam sektor kesehatan beda dengan sektor pendidikan yang mana dalam sektor pendidikan mengalami penurunan di tahun 2021 sedangkan sektor kesehatan terus mengalam peningkatan yang baik. Dalam sektor kesehatan pada tahun 2012 total pengeluaran sebesar Rp 48.429.988.925 dan pada tahun 2021 total pengeluaran di Kota Kupang sebesar Rp. 105.272.995.002 pengeluaran pemerintah terhadap sektor pendidikan dan sektor kesehatan merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah yang memacu kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan manusia.

Berhasil atau tidaknya suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Pentingnya peranan pendidikan sudah disadari oleh seluruh masyarakat di Kota Kupang.

Bersadarkan uraian di atas dan dengan asumsi-asumsi teori yang ada maka, penulis tertarik membuat penelitian ini dengan judul **“Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Kupang”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Kupang?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Kupang?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap pembangunan manusia di Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap pembangunan manusia di Kota Kupang.

Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan studi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi pada umumnya dan mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan pada khususnya.
2. Dapat digunakan sebagai sumber masukan yang berguna bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang serta menjadi referensi.
3. Dapat digunakan sebagai masukan bagi peneliti-peneliti yang lain dengan tipe penelitian sejenis.